

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
HUKUM ISLAM**

Clara Noverita A¹, dan Yulkarnain Harahab²

INTISARI

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Peraturan Perundang-undangan dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap mahar yang telah diserahkan oleh mempelai pria.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Setelah data terkumpul, data sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis, selanjutnya diambil kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) alasan pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 0132/Pdt.G/2011/PA.Yk, Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk, dan Nomor 409/Pdt.G/2015/PA.Yk telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap mahar yang mana perkawinan sudah terjadi *dukhul* (*ba'da dukhul*) maka suami tidak berhak atas pengembalian mahar yang telah diserahkan atau dengan kata lain, istri tidak wajib mengembalikan mahar yang telah diterimanya. Namun apabila belum terjadi *dukhul* (*qabla dukhul*), maka suami berhak atas pengembalian separuh atau setengah atas mahar yang telah diberikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad nikah.

Kata Kunci: *Mahar*, Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan

¹Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

²Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ANALYTICAL OF MARRIAGE CANCELLATION AT RELIGIOUS COURT YOGYAKARTA BASED ON ACT NUMBER 1/1974 AND ISLAMIC LAW

Clara Noverita A³, dan Yulkarnain Harahab⁴

ABSTRACT

The aim to be achieved in this study is to find out and analyze the suitability of the reasons for the cancellation of marriage in the Yogyakarta Religious Court with the Laws and the law of the cancellation of marriage to the dowry that has been handed over by the groom.

This study is a normative juridical research, namely legal research conducted by means of literature studies of secondary data. The secondary data includes primary legal material, secondary legal material and tertiary law. Data collection was conducted with library studies and interviews conducted to several speakers. After the data is collected, the secondary data is then processed and analyzed, then conclusions are taken.

The conclusions obtained from this study are: (1) the reason for the submission of marital cancellation in the decision Number 0132 / Pdt.G / 2011 / PA.Yk, Number 427 / Pdt.G / 2017 / PA.Yk, and Number 409 / Pdt.G / 2015/PA.Yk is in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Law Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. (2) The legal consequences of the marriage cancellation of the dowry in which the marriage has occurred *dukhul* (*ba'da dukhul*), the husband is not entitled to return the surrender that has been surrendered or in other words, the wife is not obliged to return the dowry she has received. But if *dukhul* has not happened (*qabla dukhul*), the husband has the right to return half or half of the dowry that has been given as determined in the marriage contract.

Keyword: Court decision, *Mahar*, Marriage cancellation

³Student of Master Notary Program Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta

⁴Lecturer of Master Notary Program Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta